

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak perubahan yang terjadi pada Negara Indonesia yang bersifat signifikan dan fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah, yaitu dimana sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif. Hal ini tertuang sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian implementasi otonomi daerah ini mendapat sambutan dengan adanya pengesahan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU Otonomi Daerah ini merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang sudah tidak dapat berlaku lagi.

Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota tersebut, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang komprehensif. Nugraheni (2008:2) "Pemerintah daerah berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangannya mengikuti standar akuntansi pemerintah yang dituangkan dalam PP No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)” yang telah direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Santoso dan Pabelum (2008) “Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Pradja (2006), dengan berpedoman dengan SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam rangka penyusunan dan mengasihkan Laporan Keuangan pemerintah yang baik dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai ketentuan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP No. 71 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:2) “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan”. Namun Roesyanto (2007:3) menyatakan bahwa “Rata-rata pemerintah daerah

belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)” yang telah direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP. Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu pemahaman akan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam membuat laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah latar belakang pendidikan. Sumber daya manusia keberadaannya sangat penting dalam organisasi karena sumber daya manusia menunjang organisasi melalui karya, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap organisasi. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan laporan keuangan adalah sumber daya manusia yakni perangkat SKPD yang dimiliki mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Akan tetapi terbatasnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman aparatur SKPD dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Utomo (2012) yang menyatakan bahwa sebagian besar pegawai negeri bagian keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan posisinya serta belum memenuhi sepenuhnya tentang akuntansi. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (2006), “Jumlah SDM aparatur yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada

satuan kerja pengelola keuangan baik di pusat maupun daerah, jumlahnya sangat terbatas”. Hal ini akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang kurang baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan latar belakang pendidikan perangkat SKPD pengelola keuangan, maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu juga perlu juga diperlukan faktor pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam mendukung perangkat SKPD menyusun laporan keuangan. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan agar perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah karena telah terbiasa disebabkan adanya diklat yang telah dilakukan. Hal tersebut senada dengan pendapat Latoirner dalam Rajana (2009) bahwa “Para pegawai dapat berkembang lebih pesat dan lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli”. Akan tetapi pada kenyataannya pendidikan dan pelatihan pegawai yang berlaku dewasa ini hanya bersifat formalitas guna memenuhi persyaratan jabatan saja. Sehingga akibatnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kurang efektif dan efisien.

Selain faktor pemahaman terhadap SAP, latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, perlu juga diperhatikan faktor disiplin kerja perangkat SKPD. Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam sebuah organisasi, tindakan disiplin menuntut adanya hukuman terhadap pegawai yang gagal memenuhi standard yang ditentukan. Disiplin juga mengandung nilai-nilai

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan dan ketertiban yang juga harus dimiliki perangkat dalam menyusun laporan keuangan sehingga dalam pekerjaannya para perangkat penyusun laporan keuangan mentaati standar atau pedoman sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah yakni Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman terhadap SAP, latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, serta disiplin kerja terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Disiplin Kerja Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan”**



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman SAP berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah ada hubungan yang signifikan antara pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, serta disiplin kerja terhadap penyusunan laporan pemerintah keuangan ?

1.3 Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis untuk meneliti, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, serta disiplin kerja para perangkat SKPD yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan dikemukakannya latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah. apakah pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, serta disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, serta disiplin kerja secara simultan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

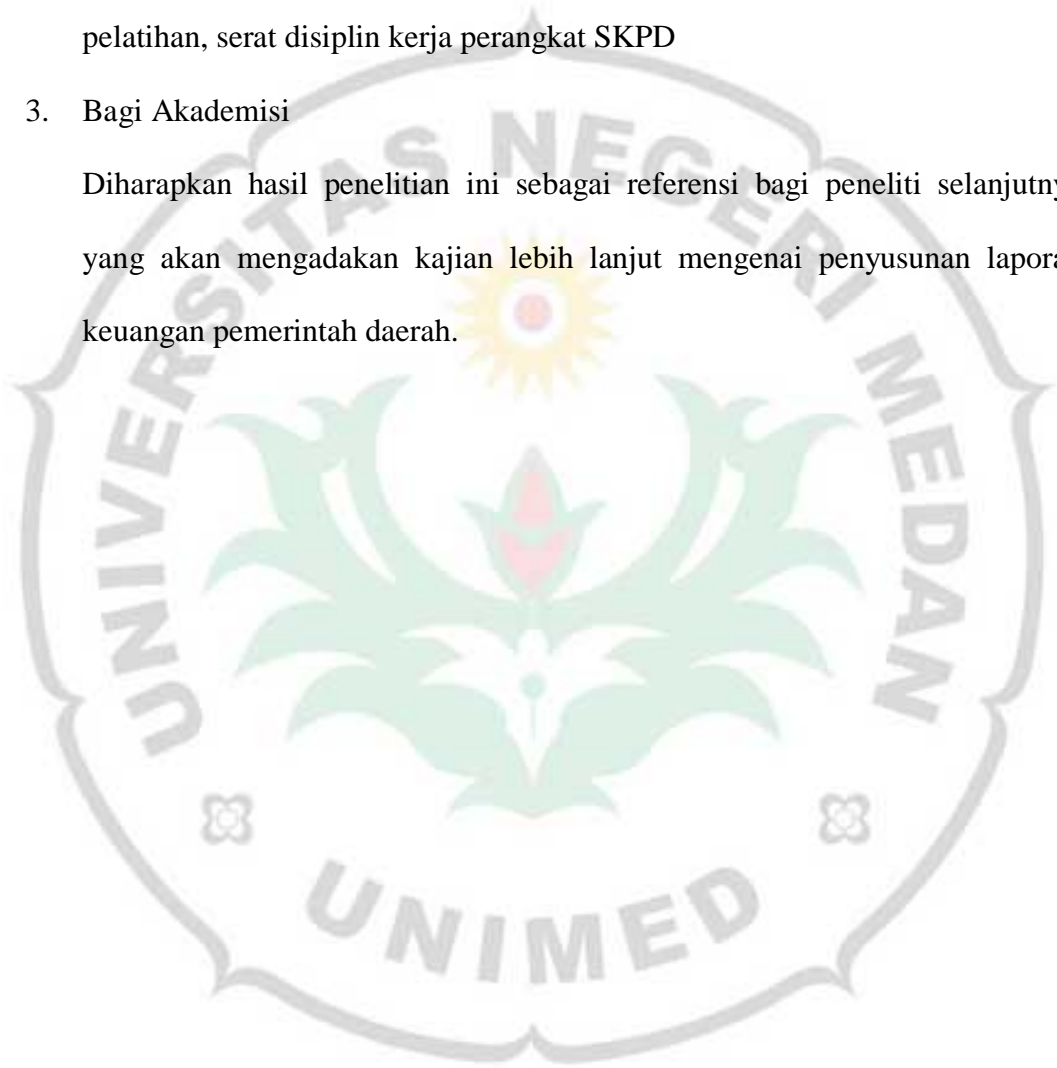
2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan SDM dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP melalui pemahaman terhadap

SAP, dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, serat disiplin kerja perangkat SKPD

3. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih lanjut mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.



THE
Character Building
UNIVERSITY